

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan dalam analisis perkembangan status Desa Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor Pendorong Perkembangan status Desa di Provinsi Riau berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah meningkatnya nilai indikator ketahanan sosial dan Ketahanan Lingkungan. Sedangkan dimensi ketahanan ekonomi yang masih rendah menjadi penghambat dalam peningkatan Indeks Desa Membangun di Provinsi Riau.
  - b. Kondisi Desa yang tetap berstatus sangat tertinggal disebabkan tidak berkembangnya Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang disebabkan indikator keterbukaan wilayah dengan kondisi geografis yang sulit berdampak kepada terbatasnya akses perdagangan, akses distribusi dan akses kredit dan kondisi rawan bencana yang tinggi tidak didukung fasilitasi tanggap bencana.
  - c. Kemampuan Desa mencapai status desa mandiri didorong kondisi eksisting Desa dengan indikator keterbukaan wilayah berupa geografis dan infrastruktur dasar yang baik dan adanya program dan kegiatan yang nyata dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.
2. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, Peningkatan Indeks Desa Membangun Provinsi Riau secara signifikan dan positif di dorong jumlah alokasi belanja pada bidang pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, tidak terduga, dan tipologi wilayah yang terdiri dari jumlah rumah tangga dan keberadaan BTS di desa Sedangkan belanja pembangunan desa tidak berdampak positif terhadap capaian Indeks Desa Membangun dan Indeks Kesulitan Geografis berdampak negatif terhadap Indeks Desa Membangun pada masing-masing Desa di Provinsi Riau tahun 2019.

3. Berdasarkan pengujian regresi logistik, alokasi belanja pemberdayaan masyarakat dan belanja pembinaan kemasyarakatan menjadi faktor pendorong untuk mengurangi peluang Desa menjadi tertinggal dan alokasi belanja pembangunan Desa menjadi faktor pendorong meningkatkan peluang desa menjadi berkembang. Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan peluang desa menjadi maju tidak dapat dilakukan hanya melalui belanja Desa.

## **B. Rekomendasi dan Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan dari relevansi hasil empiris dan pengujian hipotesis penelitian di atas, maka dapat ditentukan beberapa rekomendasi atas implikasi hasil penelitian serta keterbatasan yang dapat diperbaiki dalam kajian alokasi belanja Desa dan capaian status pembangunan Desa di masa yang akan datang, diantaranya adalah :

1. Untuk lebih meningkatkan status Indeks Desa Membangun di Provinsi Riau, perlu sinkronisasi perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah pusat, daerah, desa dan swasta terutama pada dimensi ketahanan ekonomi dalam meningkatkan indikator keterbukaan wilayah, akses perdagangan, akses kredit dan akses distribusi. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan lembaga ekonomi Desa yakni bumdes untuk mendorong terbukanya akses distribusi, perdagangan dan akses kredit.
2. Kebijakan pembangunan desa yang mengadopsi dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan perlu dilakukan sebagai faktor pendorong mengentaskan desa dari status tertinggal dan mencapai desa mandiri. Sasaran pengentasan dilakukan dengan menuntaskan pemenuhan indikator variabel Indeks Desa Membangun yang diukur terkategori rendah terutama indikator keterbukaan wilayah, pemukiman dan fasilitasi tanggap bencana. Pemenuhan indikator tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, sesuai dengan kewenangan urusan pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah daerah memetakan dan memprioritaskan desa dengan Indeks Kesulitan Geografis yang tinggi sebagai prioritas pembangunan secara sektoral, Pemerintah daerah dan

pemerintah pusat dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk program dan kegiatan prioritas dengan rujukan rekomendasi Indeks Desa Membangun.

3. Tata kelola pengalokasian belanja desa perlu disertai pendampingan oleh pemerintah yang dimulai sejak tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Belanja Desa tidak hanya difokuskan kepada belanja bidang pembangunan akan tetapi perlu digunakan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan disertai inovasi memajukan pembangunan desa.
4. Belanja pemberdayaan masyarakat dan belanja pembinaan kemasyarakatan adalah belanja yang berpeluang untuk mengeluarkan Desa dari status tertinggal, Dengan lebih mengalokasikan belanja pada bidang tersebut akan meningkatkan peluang untuk desa menjadi tidak tertinggal, Sedangkan mengalokasikan belanja pembangunan desa lebih besar akan memberikan peluang desa menjadi berkembang.
5. Peluang menjadi Desa maju tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan belanja desa, oleh karenanya dukungan program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya diharapkan mampu mendorong desa menjadi desa maju.
6. Penelitian ini memiliki keterbatasan baik dari sisi generalisasi dan penentuan objek kajian, metode penelitian, dan ruang lingkup variabel yang digunakan. Namun, hasil empiris ini tentunya sangat relevan dalam merepresentasikan realita bagaimana belanja desa dan kesulitan geografis dan rumah tangga terhadap status desa di Provinsi Riau. Akan tetapi, untuk kajian selanjutnya perlunya menambah eksistensi berbagai variabel yang relevan dan lebih kontributif dalam penelitian terhadap status desa yang dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana meningkatkan status desa menuju kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat